

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Belt and Road Initiative merupakan suatu proyek pembangunan jalan besar yang diinisiasi Xi Jinping selaku Presiden Tiongkok. Inisiasi Proyek BRI di tahun 2013 dengan nama awal *One Belt One Road* (OBOR). Dibentuk dengan tujuan untuk menghubungkan sektor perekonomian dari kawasan Asia melalui 2 konsep yaitu *Economic Belt Silk Road*, yaitu jalur yang menghubungkan rute perdagangan Tiongkok dengan negara-negara lainnya di Eropa, Asia dan beberapa negara lainnya di kawasan Pasifik dan Afrika. Terdapat 3 koridor darat dan 2 koridor maritim yang mencakup atau melewati wilayah 71 negara yang terlibat dalam BRI¹. Konsep koridor Economic Silk Road terdiri dari 2 program infrastruktur dan terasosiasi dengan lembaga keuangan untuk merealisasikannya yaitu *New Development Bank* (NDB) dan *Asian Infrastructure Investment* (AIIB)².

Maritime Silk Road melengkapi teori Balance of Power yaitu *China's String of Pearls* yang menegaskan bahwa Tiongkok berusaha membangun pangkalan di *Indian Ocean Region* (IOR) untuk memperluas kekuatan mereka dan mengamankan Selat Malaka dari potensi blokade selama perang³. Proyek ini telah memengaruhi India, sebagai salah satu negara

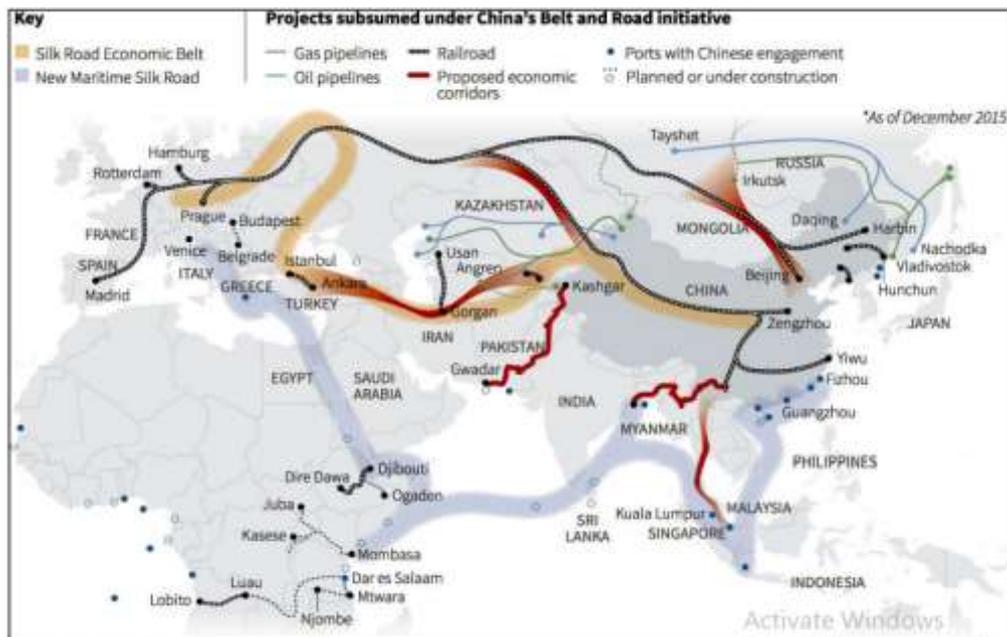
¹ World Bank. 2018. Belt and Road Initiative <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>. Diakses pada 25 februari 2021

² Fallon, T 2015, 'The New Silk Road: Xi Jinping's Grand Strategy for Eurasia', *American Foreign Policy Interests*, vol. 37, no. 3, pp. 140-147

³ Brewster, D 2016, 'Silk Roads and Strings of Pearls: The Strategic Geography of China's New Pathways in the Indian Ocean', *Geopolitics*, vol. 22, no. 2, pp. 269-291.

emerging power selain Tiongkok di Indo-Pasifik, dalam memandang kebijakan luar negeri mereka., proyek BRI telah mempengaruhi segalanya mulai dari hubungan bilateral dengan Tiongkok dengan India serta hubungan Tiongkok dengan *superpower* lainnya seperti Amerika Serikat dan Australia.

Gambar 1.1 Peta Koridor dalam Belt and Road Initiative



Sumber: Mercator Institute for China Studies, 2017

Menurut Paul T.V. yang berpendapat bahwa ketidakpercayaan *strategis/strategic distrust* yang mengakar antara India dan Tiongkok membuat kemungkinan akan adanya kerjasama antar kedua negara menjadi sangat kecil kemungkinan nya akan terjadi. Selama beberapa tahun, Tiongkok telah menjadi negara indikator pembentukan kebijakan luar negeri India sekaligus saingannya dalam kancah internasional⁴. Kedua negara ini juga merupakan anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) sebuah asosiasi

⁴ Paul T.V.. 2018. *The China-India Rivalry in The Globalization Era*. Georgetown University Press

beranggotakan lima negara dengan kekuatan ekonomi yang sedang menuju tingkat maju dan negara anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) yang berarti kedua negara ini seringkali mengambil sikap yang sama terhadap negara-negara industri dalam perdagangan internasional⁵.

Dukungan dan upaya SCO dalam konteks BRI akan memainkan peran progresif di tingkat global dan regional, terutama untuk Tiongkok. Ini juga menyediakan pengembangan yang diperlukan dan penguatan proyek infrastruktur Tiongkok dari BRI di wilayah tersebut. Namun India memiliki banyak kekhawatiran dengan BRI. Melalui forum SCO, Tiongkok mencoba menghilangkan ketidakpercayaan India. Oleh karena itu, SCO akan memainkan peran yang penting di BRI dan diharapkan dapat mempercepat kerjasama Silk Road Economic Belt.

Tabel 1.1 Kontribusi dan *stance* negara dunia terhadap BRI

Negara pro terhadap BRI	Negara regional yang terlibat dalam pembiayaan BRI	Negara non-regional yang terlibat dalam pembiayaan BRI	Negara kontra terhadap BRI
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

⁵ Wagner, Christian dan Tripathi, Siddarth. 2018. India's Response to the Chinese Belt and Road Initiative New Partners and New Formats.

Tiongkok, Argentina, Belarusia, Bulgaria, Ceko, Chili, Ethiopia, Fiji, Filipina, Hungaria, Italia, Indonesia, Kamboja, Kazakhstan, Kirgistan, Kenya, Kuwait, Kroasia, Laos, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Polandia, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Spanyol, Srilanka, Switzerland, Turki, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Yunani	Afganistan, Nepal, Australia, Azerbaijan, Pakistan, Rusia, Bangladesh, Brunei, Fiji, Filipina, Iran, Singapura, Kirgistan, Maladewa, Indonesia, Samoa, Oman, Qatar, Malaysia, Kazakhstan, Kamboja, Srilanka, Tiongkok, Timor Leste, Tajikistan, Thailand, Turki, India, UAE, Mongolia, Uzbekistan, Myanmar, Saudi Arabia, Israel, Vanuatu, Vietnam, Yordania, Laos	Austria, Denmark, Finlandia, Ethiopia, Hungaria, Islandia, Italia, Inggris, Jerman, Luxemburg, Malka, Mesir, Norwegia, Portugal, Spanyol, Switserland, Swedia, Irlandia, Perancis, Kanada, Belanda	India
--	--	--	-------

Sumber: Embassy of the People's Republic of China in Australia, 2017

Belt and Road Initiative adalah sebuah inisiasi yang kemudian dianggap oleh India sebagai sebuah strategi yang mengancam keamanan nasionalnya, karena BRI secara tak langsung mendeskripsikan sebuah strategi pengepungan atau kepada India. Selain karena adanya konflik persengketaan di teritori perbatasan Tiongkok dan India, Tiongkok juga telah membentuk relasi yang cukup dekat dengan negara-negara tetangga di sekitar India. Relasi yang dibangun oleh Tiongkok ini salah satunya adalah dengan Pakistan dengan dukungan Tiongkok terhadap program proliferasi nuklirnya juga. Kedekatan kedua negara ini semakin jelas lewat adanya kebijakan *Hexiao Gongda* oleh Tiongkok yang turut mengikut sertakan negara-negara tetangga India di daerah Asia Selatan seperti Pakistan, Nepal, Sri Lanka dan Bangladesh untuk menyaingi India yang selama ini menjadi kekuatan utama di daerah Asia Selatan, oleh karena itu Tiongkok secara langsung juga menyebabkan berkurangnya pengaruh India di kawasan nya.

Sebagai negara yang dijuluki *emerging power*, maupun India dan Tiongkok saat ini sedang bersaing agar dapat mengembangkan influence-nya di banyak negara. Hal ini semakin genting karena adanya fenomena peningkatan hubungan bilateral antar Tiongkok dan Pakistan. Merespon pengaruh dan pergerakan Tiongkok yang kian meluas, India pun mulai menaikkan kekuatannya menggunakan penekanan untuk mempertahankan diri serta mengamankan kepentingan nasionalnya⁶, hal-hal tersebut merupakan faktor penyebab India memerlukan upaya untuk mengimbangkan posisinya dengan Tiongkok.

Beberapa upaya yang ditujukan India sebagai bentuk balancing terhadap BRI salah satunya adalah proyek koridor ekonomi bernama Asia Africa Growth Corridor (AAGC) yang merupakan proyek gabungan India dan Jepang, kedua negara yang sama-sama tidak mendukung adanya BRI. Kerjasama ini dideklarasikan oleh PM Narendra Modi dan PM Shinzo Abe di bulan November 2016. AAGC adalah inisiatif diplomatik untuk mempromosikan hubungan ekonomi, strategis dan budaya dengan kawasan Asia dan Afrika secara luas di berbagai tingkat, dengan tujuan untuk memberi dorongan baru dalam mengintensifkan hubungan ekonomi, strategis dan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang kini terus bertumbuh dan implikasinya terhadap tatanan regional berkembang⁷.

Upaya berikutnya adalah dibentuknya *Blue Dot Network* (BDN). Kerjasama ini diinisiasi oleh Amerika Serikat, Jepang dan Australia pada bulan November 2019 pada Indo-

⁶ Bagchi, I. 2016. Dhaka cancels port to be built by China, India eyes another. The Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Dhaka-cancelsport-to-be-built-by-China-India-eyes-another/articleshow/50894554.cms> diakses pada 26 Februari 2021

⁷ Kesavan, K. V. 2020. India's 'Act East' policy and regional cooperation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/> diakses pada 5 Maret 2021

Pacific Business Forum di Bangkok. BDN merupakan inisiatif multipihak untuk menyatukan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mempromosikan standar yang berkualitas tinggi dan terpercaya terkait pembangunan infrastruktur global⁸.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis meninjau literatur-literatur yang berkaitan dengan proyek BRI beserta respon India yang juga merupakan *emerging power* di kawasan Asia. Literatur pertama yakni ditulis oleh Magdalena V. Monitha yang berjudul *Respon India Terhadap Strategi Belt and Road Initiative Tiongkok* yang menyimpulkan bahwa kSabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) dan Jalur Sutra Maritim (MSR). yang merupakan komponen dari BRI beserta kebijakan *Peaceful Rise* oleh Tiongkok dinilai menjadi suatu ancaman oleh India. Menanggapi hal tersebut, India merespon strategi BRI dengan melakukan internal balancing dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekuatan militer di kawasan, yang dimana hal ini sejalan dengan kebijakan dalam negerinya. Internal balancing yang dilakukan India melibatkan upaya untuk dapat meningkatkan kekuatan nasionalnya melalui sumber daya ekonomi dan kekuatan militer sehingga dapat bersaing dan bertumpu pada kekuatannya sendiri⁹.

Literatur kedua yang berjudul *Upaya India Dalam Mengatasi Ancaman Proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) Pada Masa Pemerintahan Narendra Modi* ditulis oleh Rito Septiawan yang mengagaskan bahwa Tiongkok dinilai India telah mengintervensi teritori India dan mengancam perekonomian India dengan dibangunnya CPEC. Dengan alasan tersebut India memberlakukan balancing untuk mengimbangi Tiongkok yang telah membangun CPEC di wilayahnya dengan cara penolakan tegas atas jalur CPEC yang melalui Gilgit-Baltistan yang

⁸ Lyn, Jennifer. 2020. US Blue Dot Network to counter China's BRI. <https://asiatimes.com/2020/05/us-blue-dot-network-to-counter-chinas-bri/> diakses pada 5 Maret 2021

⁹ Monitha, Magdalena. 2019. *Respon India Terhadap Strategi Belt and Road Initiatives*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan.

diklaim India sebagai wilayah teritorialnya, bergabung dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan kelompok-kelompok separatis untuk menggagalkan proyek, melakukan kunjungan diplomatis dan KTT informal dengan presiden Tiongkok guna menepis kesalahpahaman antar kedua negara dan membangun konektivitas regional dengan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui investasi pada Pelabuhan Chabahar di Iran¹⁰.

Literatur ketiga ditulis oleh Jean Francois Huchet dengan judul *Between a Geostrategic Rivalry: Emergence of a Pragmatic India-China Relationship* yang menjelaskan linimasa historis terkait hubungan India dan Tiongkok sejak beberapa tahun silam beserta penyebab rivalitas mereka hingga saat ini. Relasi India dan Tiongkok sudah memanas sejak tahun 1990-an, kendati begitu proses bilateral tetap beriringan dalam serangkaian persaingan geostrategis dan ekonomi. Hubungan India-Tiongkok terus dirundung rasa saling tidak percaya yang diwarisi dari perang 1962 yang merupakan hasil dari benturan nasionalisme dan ambisi yang saling tidak dapat didamaikan. Menurut literatur ini, India dan Tiongkok sedang berupaya untuk mengubah dunia dengan kekuatan ekonomi dan militer mereka masing-masing, tetapi mereka melakukannya secara terpisah dan tidak melalui kemitraan strategis¹¹.

Berdasarkan ketiga literatur di atas, peneliti lantas memiliki pandangan dan posisi yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat 2 penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang alasan-alasan India memberlakukan balancing sebagai cara India untuk menandingi BRI, kemudian juga penelitian yang membahas BRI melalui sudut pandang negara-negara di kawasan Asia secara keseluruhan serta menelusuri catatan historis relasi negara Tiongkok dan India. Sehingga dalam penelitian ini, penulis melihat terdapat perbedaan

¹⁰ Septiawan, Rito. 2021. Upaya India Dalam Mengatasi Ancaman Proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) Pada Masa Pemerintahan Narendra Modi. Skripsi. Universitas Andalas.

¹¹ Huchet, Jean-François. (2008). *Between Geostrategic Rivalry and Economic Competition. Emergence of a Pragmatic India-China Relationship*. China Perspectives.

respon India dibandingkan kebanyakan negara yang mendukung serta yang terlibat dalam proyek BRI. Dikarenakan terdesaknya posisi India yang berpendapat bahwa kedaulatan serta keberlangsungan perdagangan di negaranya mendapat intervensi akibat berjalannya BRI oleh Tiongkok, maka penulis hendak menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan India untuk mengimbangi proyek Belt and Road Initiative milik Tiongkok melalui konsep Balancing dalam teori Balance of Power dan konsep Geoekonomi untuk menganalisis fenomena ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan di atas, penelitian ini menetapkan rumusan masalah **“Apa saja upaya India untuk mengimbangi proyek Belt and Road Initiative Tiongkok tahun 2013-2020?”** yang nantinya akan dijawab di akhir penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini memiliki tujuan secara umum yaitu untuk menjadi acuan berupa penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan penelitian dalam topik serupa di masa yang akan datang. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian yang diangkat bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah India merespon inisiasi Presiden Tiongkok yang mewujudkan megaprojek yang dapat mendominasi

perdagangan serta dunia politik terutama di kawasan Asia dan Afrika. Juga untuk menjelaskan apa saja upaya yang telah dilakukan India untuk mengimbangi Tiongkok di sektor investasi infrastruktur seperti proyek Belt and Road Initiative ini.

1.4 Kerangka Berpikir

Menilik kembali bagian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis kemudian menggunakan teori dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena respon kontradiktif India yang ingin mengimbangi Tiongkok dengan proyek BRI nya, yakni Balance of Power dan Geoekonomi.

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Balance of Power

Dalam konsep Balance of Power yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*, sistem internasional dianggap sebagai anarkis, tanpa ada suatu entitas yang memiliki otoritas penuh untuk memegang kendali. Negara adalah aktor utama dalam sistem internasional, karena negara dapat menetapkan ketentuan-ketentuan, memonopoli, menggunakan kekuatan mereka di dalam wilayah mereka dan memimpin suatu kebijakan luar negeri¹². Menurut Waltz, BoP terjadi ketika dua koalisi (negara lemah dan negara kuat) terbentuk dalam sebuah sistem internasional, negara-negara sekunder akan berpihak pada yang lebih lemah/sesamanya, sehingga tidak terancam oleh pihak yang lebih kuat¹³.

¹² Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub.

¹³ *ibid*

Selain itu, keamanan nasional merupakan instrumen penting dalam konsep ini. Teori ini berasumsi bahwa ketika terdapat suatu negara yang cukup kuat sehingga mampu mendominasi negara lain, maka negara tersebut akan berupaya untuk memanfaatkan kekuatannya dengan menyerang atau memeralat negara lain yang lebih lemah. Hal ini mendorong negara-negara yang lebih lemah untuk bersatu dalam sebuah koalisi pertahanan. Beberapa akademisi ber-aliran realisme berpendapat bahwa situasi antar negara yang seperti ini cenderung menjadi seimbang. Koalisi negara-negara akan stabil dalam jangka waktu yang lama karena negara tidak ada yang terdorong untuk menyerang atau mendominasi.

Berdasarkan konsep Balance of Power, negara dapat menjamin *national security* jika terdapat kestabilan internal dan eksternal. Sebagaimana kestabilan internal, negara mempersiapkan dan melindungi diri dan berusaha meningkatkan kemampuan militer dan teknologi mereka. Waltz berpendapat bahwa negara masing masing memberlakukan *self-help* dan melakukan perdagangan terbatas untuk mencapai kemandirian ekonomi, yang mengerucut pada prediksi Waltz terkait tingkat kerja sama ekonomi yang rendah antar *great powers* ataupun *emerging powers*¹⁴.

Negara adidaya memiliki modal berupa kekayaan atau kemampuan ekonomi yang melimpah untuk membangun sektor militer yang dapat digunakan mempertahankan status mereka. Hal ini berarti, jika terdapat negara yang mengalami saling ketergantungan maka akan berpotensi timbulnya ancaman di bidang keamanan, maka dari itu negara dapat menentukan langkah untuk mengorbankan kekuatan ekonomi atau materi yang dimilikinya untuk menjamin keamanan. Terdapat salah satu strategi utama yang dapat dilakukan oleh negara dalam teori Balance of Power yaitu Balancing yang menjadi alat untuk menganalisis respon India sehingga

¹⁴ ibid

India terdorong untuk membentuk Asia Africa Growth Corridor dan bergabung ke dalam Blue Dot Network sebagai bentuk upaya menandingi BRI.

1.4.1.1.1 Balancing

Balancing yang merupakan salah satu strategi dalam konsep Balance of Power mengasumsikan bahwa munculnya sebuah negara hegemoni akan dianggap mengancam tatanan dunia yang sudah berupa multi-state. Sehingga sistem seperti ini “memaksa” seluruh negara terlibat untuk mengimbangkan dan meminimalisir adanya potensi hegemon¹⁵. Singkatnya, strategi Balancing membuat negara atau kelompok yang menjadi bagian dari sistem multi anggota menjadi bertindak agar peluang dan kemampuan mereka setara dengan negara-negara yang lebih kuat¹⁶. Tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan negara-negara yang kuat dan yang berpotensi menjadi hegemon bertindak menggunakan kemampuan militer mereka dan menyasarkan penggunaan hard power pada negara-negara yang lebih lemah.

Berdasarkan strategi balancing, sebuah negara yang didorong oleh *national security* dan memperjuangkan *sustainability*, akan terus melebarkan dan memperkuat kemampuan militer mereka serta nilai-nilai *hard power* untuk menghambat jika muncul suatu negara kuat atau ada negara yang terus mengalami kenaikan dalam berbagai aspek yang berpotensi menggoyahkan stabilitas negaranya¹⁷. Dalam balancing terdapat konsep yang menggambarkan bahwa internal balancing berlawanan dengan external balancing, jika dalam asumsi external

¹⁵ Mowle Thomas & Sacko David (2007) *The Unipolar World: An Unbalanced Future*. New York: Palgrave Macmillan.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Goh Evelyn (2007) *Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies*. *International Security* 32 (3) pp.113-157

balancing, dijelaskan bahwa cara negara untuk mengimbangi piha lainnya adalah dengan bersatu dan membentuk aliansi untuk mengimbangi dan memperoleh pengaruh yang lebih besar atas kekuatan yang semakin meningkat atau mendominasi. Belakangan ini, muncul suatu perspektif baru yang disebut *soft balancing*. Perspektif baru ini menggambarkan suatu metode dimana negara sebagai aktor mengimbangi aktor lain yang lebih kuat dengan memperkuat aspek ekonomi, militer ataupun mengencarkan diplomasi mereka dengan harapan agar negara yang memberlakukan *balancing* berhasil memberi batasan terhadap negara yang lebih kuat/yang berpotensi mengancam serta menghambat peningkatan kekuatan dan dominasi mereka .¹⁸

Dalam Balancing, terdapat 2 jenis upaya yang bisa digunakan oleh suatu negara. Yang pertama yakni dikenal dengan Internal Balancing. Internal balancing melibatkan upaya untuk memperluas pengaruh dan kekuatan negara dengan meningkatkan sumber daya ekonomi nasional, pengaruh politik atau kekuatan militer nasional milik suatu negara agar kemampuan nasional negara dapat dipercayakan untuk menghadapi dan menyaingi kekuatan hegemon dan negara dapat mengimbangi secara lebih lancar dalam sistem dunia internasional. Negara kuat dan lemah (secara ekonomi) dapat dikategorikan melalui faktor-faktor berikut; sumber daya alam dan sumber daya masyarakat, penanaman modal, nilai Produk Domestik Bruto dan arus perdagangan dan keuangan. Negara yang lemah (secara ekonomi) cenderung menghadapi tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga berdampak pada investasi dan usaha. Dan kesulitan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi secara produktif¹⁹.

¹⁸ Levy Jack S (2004). What do Great Powers Balance Against and When? . Dalam: TV Paul, JJ Wirtz, dan M Fortmann (eds) Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century. Stanford: Stanford University Press.

¹⁹ Beckley, Michael. 2018. The Power of Nations: Measuring What Matters. International Security 2018; 43 (2): 7–44.

Dalam sistem anarki, penerapan sistem internal balancing dinilai lebih kredibel daripada external balancing karena bersandar pada tindakan independen dan strategi²⁰. Keseimbangan eksternal berarti memperkuat dan memperluas aliansi dan kerja sama antar negara untuk menggagalkan hegemoni atau melawan potensi ancaman ekonomi negara berkembang. Menghadapi ancaman bersama dan negara-negara dominan yang dapat membahayakan keamanan atau kelangsungan sistem kolektif, negara-negara diharapkan untuk mengesampingkan isu-isu sekunder dan bergabung dengan aliansi ataupun koalisi penyeimbang. Sehingga balancing dapat digunakan untuk menganalisis isu antar dua negara atau lebih.²¹

Perimbangan eksternal adalah perjanjian aliansi di mana suatu negara bergabung dengan negara yang lebih kuat untuk menentanginya bersama negara yang lebih kuat, dalam hal ini melalui aspek Ekonomi, yang dianggap dapat membahayakan oleh negara yang memberlakukan balancing. Faktor-faktor yang menjadi perhitungan dalam melakukan Balancing adalah ketika negara yang melakukan Balancing berusaha meminimalisir kemungkinan kehilangan kendali atas wilayah/teritori vital mereka, untuk meningkatkan kemampuan negara mereka dan untuk mengurangi kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang mengancam. Seperti yang dinyatakan oleh Waltz *“The present unipolar system is unlikely to last and that we are seeing the early phases of an “all-but- inevitable movement from unipolarity to multipolarity”.*²² Pada saat yang sama, Waltz menegaskan bahwa struktur

²⁰ Goh, Evelyn. 2007. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies. *International Security* 32 (3) pp.113-157

²¹ Levy Jack S (2004). What do Great Powers Balance Against and When? . Dalam: TV Paul, JJ Wirtz, dan M Fortmann (eds) *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press.

²² Nexon, D. H. (2009). *The Balance of Power in the Balance [Review of War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe; The Balance of Power in World*

internasional dan mekanisme terkaitnya hanya "membentuk dan mendorong" unit ke arah keseimbangan dinamika kekuasaan.

Sesuai dengan pernyataan oleh Waltz di atas, dapat disimpulkan bahwa multipolaritas tidak menutup adanya kemungkinan negara melakukan Balancing. Sehingga negara yang lebih kuat dalam aspek ekonomi masih memiliki kemungkinan untuk dijadikan aliansi oleh negara yang merasa terancam dan ingin memberlakukan Balancing. Hal tersebut menjadikan metode balancing semacam ini sebagai tolak ukur untuk memastikan keamanan melalui koalisi gabungan terhadap aktor yang lebih kuat atau berpotensi hegemon yang dapat membahayakan kesejahteraan dan keberlangsungan negara lebih lemah²³.

Negara memanfaatkan konsep balancing untuk menjauh dari ancaman dominasi oleh negara yang lebih dominan. Negara lemah memiliki kepentingan untuk menghambat aktor yang dapat berpotensi menjadi hegemon sebelum akhirnya menjadi terlalu kuat dan memberi ancaman bagi negara mereka. Hal ini diberlakukan untuk menghindari negara lemah menjadi korban atas kekuasaan negara yang lebih mendominasi²⁴. *Self-help* atau menggabungkan diri dan beraliansi dengan negara yang sama-sama memiliki kesempatan kecil untuk mendominasi menjadi alternatif yang lebih aman untuk saling meningkatkan *national capability*. Karena balancing lebih akurat dipandang sebagai respons terhadap ancaman, hal ini penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang akan mempengaruhi tingkat ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh negara. Berdasarkan asumsi Kenneth Waltz, terhitung sebanyak empat

History; Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century; Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power, by V. T. Hui, S. J. Kaufman, R. Little, W. C. Wohlforth, T. V. Paul, J. J. Wirtz, M. Fortmann, & R. L. Schweller]. *World Politics*, 61(2), 330–359.

²³ Goh Evelyn (2007) Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies. *International Security* 32 (3) pp.113-157

²⁴ *ibid*

faktor yang menjadi motif negara untuk melakukan balancing. Yang pertama yakni Aggregate Power, kedua Proximity, serta terdapat juga Offensive Capability and Offensive Intentions.

Semakin besar total sumber daya suatu negara—Populasi, Kekuatan militer, Kemajuan teknologi, Kekuatan ekonomi industri, dll— maka akan semakin luas kemungkinan intimidasi yang dapat ditimbulkannya pada negara lain. Sedikit perbedaan dengan *proximity* yang mana proximity berarti suatu negara juga mampu sebanding dalam merespon intimidasi dari negara yang dekat dengan teritorinya. Karena kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan semakin mampu menjangkau, seiring dengan dengan kedekatan jarak. Negara yang wilayahnya berdekatan dapat memunculkan ancaman yang lebih besar daripada negara yang lokasinya lebih jauh. Hal ini membuat indikator *proximity* memperkirakan bahwa jarak merupakan faktor yang memastikan imbas atas ancaman potensial yang dapat ditimbulkan negara yang lebih dominan²⁵.

Sedangkan *offensive capability*, memperkirakan bahwa negara dengan kekuatan yang lebih besar cenderung mengintervensi negara lain yang lebih lemah jika dibandingkan dengan negara-negara lebih kecil yang memiliki kemampuan militer dan ekonomi yang tidak cukup kuat atau hanya mampu menegakkan negara sendiri saja tanpa ada upaya mengembangkan kekuatan negaranya dan menyerang balik²⁶. Negara yang terletak dekat dari negara-negara dengan kemampuan ofensif yang besar mungkin akan dipaksa untuk “ikut saja/saling mengikuti” karena mengimbangi sebuah aliansi tidak memungkinkan bagi negara lemah tersebut. Kemudian *offensive intention* adalah ketika suatu negara kuat atau negara agresor

²⁵ Starr, H., & Most, B. (1976). The Substance and Study of Borders in International Relations Research. *International Studies Quarterly*, 20(4), 581-620

²⁶ Jervis, R. (1978). Cooperation Under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214. Retrieved March 7, 2021,

cenderung memprovokasi negara lain agar negara yang lebih lemah mengimbangkan diri dan melawan mereka²⁷.

Bahkan negara dengan kemampuan yang biasa saja, tidak terlalu kuat atau bahkan militernya lemah dapat memicu respons penyeimbang jika dianggap sangat agresif. Bagaimanapun, jika niat negara agresor tidak mungkin diubah, maka balancing dengan negara lain adalah cara terbaik untuk menghindari menjadi korban²⁸.

Because power is a means and not an end, states prefer to join the weaker of two coalitions of states are wish to maximize power, they would join the stronger side, and we would see not balances forming but a world hegemony forged. this does not happen because balancing, not bandwagoning, is the behavior induced by the system. the first concern of states is not to maximize power but to maintain their positions in the system. (Waltz 1979, 126-27)

Hal ini dilakukan oleh India agar dapat mencegah ancaman dari Tiongkok dan mengalihkan pada pihak lain. Melalui kerja sama dengan BDN di sektor investasi infrastruktur keempat negara dapat melihat kekuatan dan kapabilitasnya masing-masing dan membangun relasi yang saling menguntungkan untuk mengejar kepentingan nasionalnya²⁹. Dengan balancing, India dapat membatasi ancaman eksternal dari Tiongkok dan mengimbangi ancaman yang ditujukan padanya. Perilaku India dalam melakukan balancing didasari oleh

²⁷ He Kai (2008) Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations* 14 (3) pp.489-518

²⁸ Walt, Stephen M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3–43.

²⁹ He Kai (2008) Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations* 14 (3) pp.489-518

beberapa faktor yakni aggregate power Tiongkok, kedekatan geografisnya dengan Tiongkok (*proximity*), *offensive capability*, dan *offensive intentions* dari Tiongkok. Faktor-faktor ini dapat dilihat melalui China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) yang merupakan salah satu koridor ekonomi bagian dari BRI.

Koridor ini bersinggungan dengan wilayah perbatasan India yang bermasalah dengan Pakistan. Dengan tingginya jumlah populasi, militer, dan kecakapan teknologinya yang mulai mendunia, maka kekuatan agregat Tiongkok dapat menjadi ancaman tersendiri bagi India. Hal ini dapat menekan dominasi India di kawasan nya. Sedangkan dengan adanya kedekatan geografis, baik India dan Tiongkok akan mempersepsikan tindakan lawan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan nasionalnya. Hal ini dapat dilihat pasca Perang India-Tiongkok pada tahun 1962, dimana masing-masing negara mulai mengamankan perbatasannya dengan melakukan patroli dan penjagaan. Kekuatan dan intensi ofensif Tiongkok dapat dilihat pula dari usahanya dalam melakukan klaim atas Laut Cina Selatan dan pembangunan fasilitas militer dan pulau buatan secara ilegal di wilayah Laut Cina Selatan³⁰.

Perebutan wilayah perairan ini menjadi sengketa internasional dan membuat India merasa terancam apabila Tiongkok sewaktu-waktu melakukan hal serupa di Samudra Hindia. Pembentukan BRI beserta perluasan koridor-koridor ekonominya merupakan langkah Tiongkok untuk meng-ekspansi pengaruhnya di dunia, melihat ini Tiongkok yang satu langkah di depan India, maka India menggabungkan diri ke dalam Blue Dot Network. Sehingga agar negara mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan tersebut, maka penting bagi India

³⁰ Hilmann, Jonathan dan McCalpin, Maesea. 2020. The China-Pakistan Economic Corridor at Five. Tersedia dalam <https://www.csis.org/analysis/china-pakistan-economic-corridor-five> diakses pada 19 Maret 2021

untuk melakukan balancing terhadap Tiongkok. Selain permasalahan teritorial, faktor ekonomi merupakan faktor penggerak terbesar atas dilakukannya Balancing oleh India, menimbang dari bagaimana BRI telah memperkuat Tiongkok secara ekonomi dan membantu memperluas aspek perdagangan negara Tiongkok. Menurut Nexon, tujuan akhir dari diberlakukannya Balancing adalah mencegah aktor yang lebih kuat mencapai hegemoni. Sehingga apabila intervensi berupa balancing ini sukses, maka keseimbangan kekuatan akan hadir³¹.

1.4.1.2 Konsep Geoekonomi

Geoekonomi pertama kali digagas pada tahun 1990 oleh penasihat ekonomi AS Edward Luttwak. Konsep geoekonomi merupakan evolusi dari konsep geopolitik yang telah berubah dari ide politik asli menjadi ide ekonomi. Perbedaan mendasar antara geoekonomi dan geopolitik adalah bahwa geoekonomi berfokus pada fenomena pertumbuhan ekonomi dan globalisasi.³² Selain itu, Luttwak menjelaskan dalam buku Geoekonomi Klaus Solberg Soilen bahwa ada dua hal mendasar yang membedakan geoekonomi dengan geopolitik. Pertama, isu geoekonomi tidak terkait dengan aktivitas kebijakan keamanan, melainkan kegiatan di sektor ekonomi. kedua, yakni negara berpartisipasi. Bagi Luttwak, geoekonomi berfokus pada aspek strategis seperti sumber daya alam. Edward Luttwak berkata³³. Edward Luttwak juga mengemukakan bahwa:

“Prinsip-prinsip politik tradisional telah berubah, seperti yang terlihat di era sekarang ini ketika banyak yang menyepakati adanya metode perdagangan yang telah menggantikan metode militer. Investasi sebagai pengganti tenaga panas, inovasi sipil menggantikan kemajuan militer. Tentara penembus pasar yang menggantikan barak dan basis.Negara

³¹ Nexon, D. (2009). The Balance of Power in the Balance. <i>World Politics,</i> <i>61</i>(2), 330-359. Retrieved September 6, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/40263485>

³² Soilen, K. S., 2012. *Geoeconomics*. London: Bookboon.

³³ Soilen, K. S., 2012. *Geoeconomics*. London: Bookboon.

sebagai unit yang terstruktur secara spasial yang sengaja membagi wilayahnya, meskipun wilayahnya tidak hilang, sekarang menjadi geopolitik yang usang. Untuk melengkapi peran, giliran geoekonomi. Geoekonomi adalah istilah terbaik yang dapat saya pikirkan untuk menggambarkan kombinasi konflik logika dan metode perdagangan.”³⁴

Geoekonomi merupakan suatu skema kebijakan luar negeri dan sebuah pemikiran/ideologi yang menggambarkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan *foreign policy*. Geoekonomi berfokus pada masalah ekonomi yang terkait dengan situasi geografis negara. Lebih lanjut Soilen menyatakan bahwa geoekonomi adalah studi yang memiliki kaitan dengan observasi strategis. Soilen menyatakan bahwa sistem dunia saat ini tidak lagi unipolar atau bipolar. Dia menjelaskan situasi dunia saat ini di mana negara-negara saling bergantung dan saling bergantung, menjadikan ekonomi sebagai alat yang berguna untuk mendapatkan kekuasaan dan mencapai tujuan strategis nasional³⁵.

Sementara itu, dalam jurnal *GeoEconomics as Concept and Practice in International Relations* yang ditulis oleh Soren Scholvin dan Mikael Wigell membahas geoekonomi yang digambarkan sebagai strategi pengelolaan kawasan dari tujuan dan motif ekonomi seperti investasi dan perilaku meningkat. Geoekonomi merupakan perkembangan dari geopolitik ke ekonomi dengan fokus pada politik, dan ia menganggap dirinya sebagai contoh Tiongkok sebagai panutan baru dalam politik dunia. Geoekonomi memiliki variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan geoekonomi, seperti letak geografis, faktor ekonomi, geopolitik, dan geopolitik³⁶. Terdapat juga variabel-variabel yang memengaruhi perkembangan geoekonomi suatu negara yakni faktor ekonomi, geopolitik dan geo-kultur serta lokasi

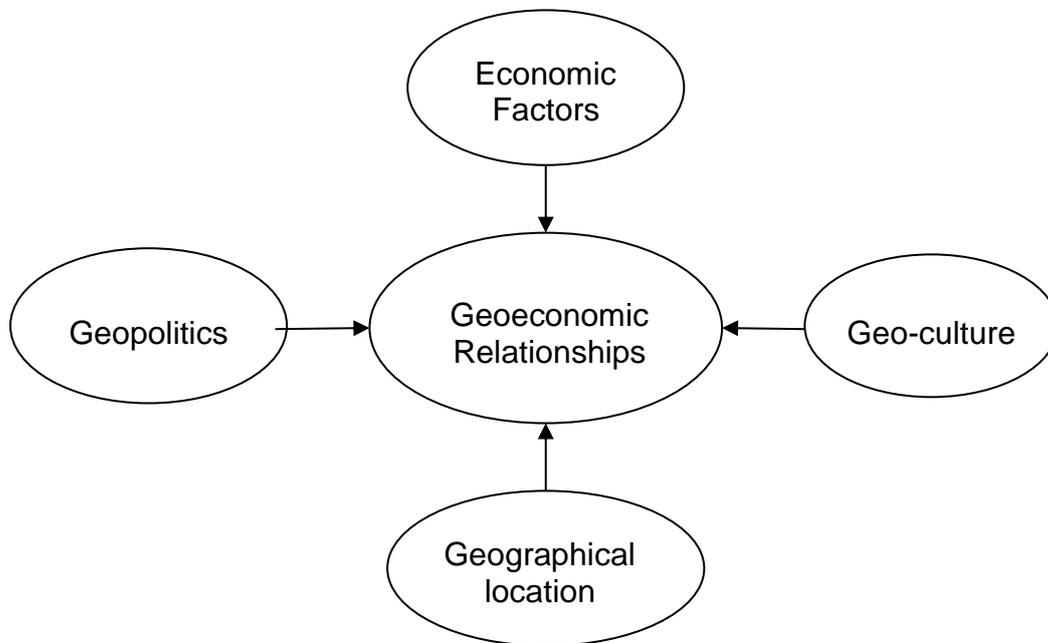
³⁴ Luttwak, E. (1990). *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*. *The National Interest*, (20), 17-23.

³⁵ Soilen, K. S., 2012. *Geoconomics*. London: Bookboon.

³⁶ Wigell, M. dan Scholvin, S. 2018. *Geo-Economics as Concept and Practice in International Relations: Surveying the State of the Art*, FIIA Working paper, 102(April), pp. 15.

geografis³⁷. Korelasi antar keempat variabel ini akan diperjelas guna menentukan analisis secara keseluruhan.

Gambar 1.2 Indikator pemengaruh Geoekonomi



Sumber: Wang, et all. 2017

Faktor ekonomi mempengaruhi bagaimana geoekonomi berjalan secara langsung. Faktor ekonomi memiliki pengaruh terbesar terhadap hubungan geo-ekonomi, seperti yang dikatakan Michael Mandelbaum dalam bukunya, tujuan ekonomi adalah materi/kekayaan. Materi tidak terbatas, yang membuat ekonomi menjadi *positive sum game*³⁸. Oleh karena itu, faktor ekonomi dalam hubungan geo-ekonomi menjadi prioritas.

Geo-lokasi bekerja pada hubungan geo-ekonomi melalui cara langsung dan tidak langsung. Secara umum, geo-lokasi bertindak atas hubungan geo-ekonomi melalui faktor-faktor ekonomi, geo-kultur dan geopolitik. Jika digabungkan, lokasi geografis juga memfasilitasi kerjasama geo-ekonomi. Geopolitik bertindak atas hubungan geo-ekonomi

³⁷ Shufang Wang, et all. 2017. The key Driving Forces for Geoeconomic Relationship Between China and ASEAN Countries. Sustainability 9, 2363. DOI: 10.3390/su9122363

³⁸ Mandelbaum, M. The Road to Global Prosperity; Simon and Schuster: New York, NY, USA, 2014

secara langsung dan berperan dalam hubungan geo-ekonomi melalui faktor-faktor ekonomi. Geopolitik dan geo-ekonomi biasanya saling melengkapi dan mempromosikan.

Geo-ekonomi adalah penstabil untuk geopolitik. Kerja sama ekonomi dan saling ketergantungan adalah dasar dari hubungan politik. Sebaliknya, relasi politik juga mendorong integrasi dan perbaikan ekonomi. Sebagai variabel perantara, geo-kultur mempengaruhi hubungan geo-ekonomi melalui geolokasi, faktor ekonomi dan geopolitik. Geo-kultur mengikuti jalur konduktif seperti "budaya-ide-perilaku-kerjasama", dan memainkan peran yang dapat ditularkan dalam pembangunan berkelanjutan geo-ekonomi. Di tingkat global, pola geo-ekonomi berdasarkan tingkat perantauan masyarakat India merupakan faktor penting dalam distribusi global geo-ekonomi India³⁹. Kekuatan pendorong untuk hubungan geo-ekonomi melibatkan kekuatan endogen dan kekuatan eksternal. Penggerak ekonomi adalah kekuatan endogen, sedangkan penggerak politik, budaya dan lokasi merupakan kekuatan eksternal. Penggerak ekonomi meningkatkan hubungan geo-ekonomi melalui pasar, kebijakan industri, teknis, jaringan dan mekanisme pembagian keuntungan. Penggerak politik memfasilitasi hubungan geo-ekonomi melalui kerjasama, negosiasi, koordinasi dan mekanisme kelembagaan. Penggerak budaya meningkatkan hubungan geo-ekonomi melalui mekanisme transmisi. Penggerak lokasi memajukan hubungan geo-ekonomi melalui mekanisme pemilihan.

Geoekonomi menganggap ekonomi sebagai fondasi terpenting dari kekuatan nasional untuk mengamankan hak-hak istimewa regional. Oleh karena itu, Geoekonomi dapat digambarkan sebagai penggunaan ekonomi sebagai sarana utama kekuatan nasional untuk menggunakan sumber daya alam di wilayah tersebut. Sumber daya alam ini adalah sumber

³⁹ Yang, Wenlong & Du, Debin & Liu, Chengliang. (2016). Study on the spatial-temporal evolution and internal mechanism of geo-economic connections of China. 71. 956-969

daya komersial nasional dan dapat menyebabkan kolonisasi ekonomi. Geoekonomi juga merupakan penggunaan sarana ekonomi untuk meningkatkan kepentingan geopolitik negara, seperti kebijakan investasi dan perdagangan. Kebijakan investasi proyek BRI merupakan tolak ukur penerapan konsep geoekonomi. Konsep geoekonomi berfokus pada sengketa wilayah dan ekonomi dunia. Konsep geoekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif nasional, tetapi pada dasarnya alat dan metode yang digunakan berbeda. Geopolitik menggunakan militer dan politik, sedangkan Geoekonomi menggunakan ekonomi dan berfokus pada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan globalisasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menggunakan konsep geoekonomi untuk menganalisis upaya India untuk menyelaraskan Belt and Road Initiative dengan motivasi ekonomi, melalui pembentukan sistem perdagangan dan ekonomi bernama AAGC yang menandakan pendekatan geoekonomi oleh India.

Karena tidak memiliki negara kemitraan yang seimbang di lingkungannya sebelumnya, India mengupayakan agar kemitraan bersama Jepang dapat memberi peran yang lebih besar dalam memenuhi permintaan kerja sama ekonomi yang meningkat di banyak negara (Aspek geografi), termasuk di Timur Laut India sendiri. AAGC mewakili hubungan penting antara India dan Jepang untuk pengembangan geoekonomi sebagai kawasan strategis baru untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan mereka sendiri dan juga sebagai cara untuk menahan pengaruh Tiongkok dengan BRI nya di kawasan Asia. Diumumkannya *AAGC Vision Statement* merupakan langkah maju baru bagi India dan Jepang di Afrika, sebuah upaya yang jelas untuk menyelaraskan prioritas ketiga negara. Jelas, hal ini juga menjadi untuk mengimbangi adanya peningkatan aktivitas ekonomi Tiongkok di Afrika, mirip dengan upaya yang dilakukan di Asia. Perusahaan India melihat AAGC sebagai sumber pendanaan alternatif

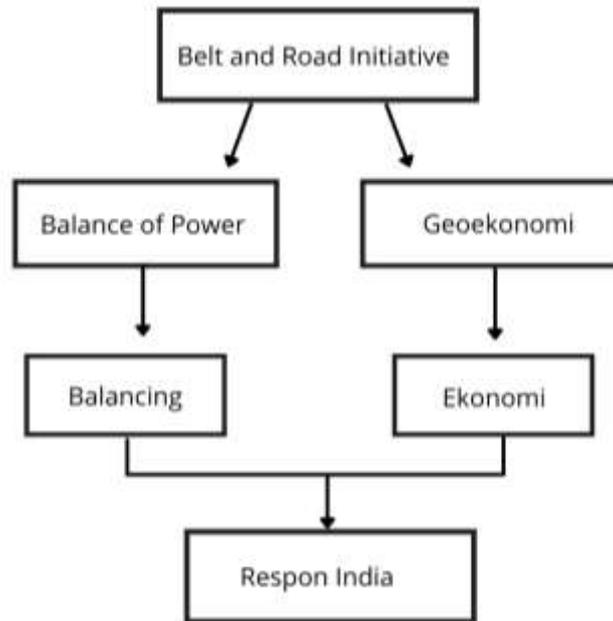
untuk mengamankan proyek besar di Afrika seperti yang mereka lakukan di bawah proyek LOC India⁴⁰.

Dalam jangka menengah, fokus utama AAGC harus pada proyek infrastruktur. Proyek semacam itu membutuhkan koordinasi antara lembaga pemberi pinjaman India dan Jepang serta negara-negara Afrika dan prioritas pembangunan mereka. Dari segi geoekonomi, India telah menolak Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC yang didirikan Tiongkok karena alasan ekonomi. Faktor pertama adalah bahwa Pakistan mendapat manfaat dari investasi dari proyek-proyek CPEC. Faktor kedua, Tiongkok akan mendapatkan akses yakni jalur perdagangan alternatif melalui pelabuhan Gwadar. Pelabuhan Gwadar tidak hanya dapat menghemat biaya dan waktu logistik, tetapi juga meningkatkan keamanan perdagangan. Akses alternatif melalui pelabuhan Gwadar dapat meningkatkan perdagangan Tiongkok dan berdampak pada perdagangan India di Asia Selatan.

⁴⁰ Ghiasy, R & Zhou, J 2017, *The Silk Road Economic Belt: Considering security implications and EU-China cooperation prospects*, Stockholm International Peace Research Institute, Singapore. <https://asia.fes.de/news/the-silk-road-economic-belt/> diakses pada 25 februari 2021

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran



Sumber: Gambar oleh penulis

Berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terbentuklah sintesa pemikiran seperti pada bagan di atas. Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menganalisis menggunakan teori Balance of Power yaitu melalui strategi Balancing karena respon India dalam menyikapi proyek BRI oleh Tiongkok ini sangat menyerupai deskripsi perilaku ketika sebuah negara merasa terancam melalui sudut pandang Realisme dalam Balance of Power. Selain itu konsep Geoekonomi juga membantu analisis dibentuknya upaya-upaya yang dianalisis sebagai instrumen ekonomi untuk mencapai kepentingan politik yang mencakup faktor-faktor memengaruhi berkembangnya aspek geoekonomi yaitu faktor ekonomi, geo-lokasi dan geo politik.

Relevansi antara karakteristik balancing yang merupakan indikator dari Balance of Power dengan kesuksesan konsep Geoekonomi direlevansikan karena Balancing merupakan indikator yang fleksibel dan dapat diaplikasikan kedalam konsep Geoekonomi karena memiliki urgensi ketika suatu negara mengalami intervensi teritori yang disebabkan oleh negara lain yang berdampak kepada ekonomi dari negara pelaku Balancing merupakan gagasan yang perlu diangkat, salah satunya melalui konsep geoekonomi.

Oleh sebab itu, dibutuhkan Balancing sebagai pendorong konsep Geoekonomi karena dalam Balancing, negara dapat memilih untuk beraliansi dengan negara lain yang lebih kuat di bidang ekonomi agar negara yang memberlakukan Balancing dapat meraih kesetaraan kekuatan yang ingin dicapai. Sehingga aktor negara yang melakukan balancing tidak lagi rentan terhadap ancaman dari negara lain yang lebih kuat. Begitu pula fungsi konsep geoekonomi yang dapat mengendalikan suatu teritorial negara yang didorong dengan tujuan serta motif ekonomi seperti investasi dan perdagangan oleh aktor negara lain, dikarenakan konsep geoekonomi memiliki instrumen utama ekonomi untuk mencapai kepentingan politik. Sehingga demi tercapainya kepentingan politik, Geoekonomi dijalankan bersamaan dengan Balancing.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kedua teori dan masing masing indikator didalamnya yang telah dijabarkan oleh penulis dalam kerangka pemikiran, indikator Balancing dalam Balance of Power menjawab mengapa India membentuk AAGC bersama Jepang. Analisis melalui Balancing sesuai dengan asumsi dasar Balance of Power. Geoekonomi yang memandang ekonomi dan teritori untuk meraih keuntungan dan kepentingan politik, kemudian ditemukan dengan Balancing yang memiliki latar belakang politik dengan cara beraliansi dengan negara lain dan menyeimbangkan kekuatan dengan negara lain seperti dalam teori Balance of Power.

Kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua pandangan ini kemudian digunakan oleh penulis untuk melihat pertarungan politik yang ada dalam tatanan internasional dari bursa ekonomi global untuk membentuk evolusi ekonomi global. Perspektif geoekonomi melihat bahwa kerjasama ekonomi berguna sebagai pelumas strategi Balance of Power dalam meningkatkan keamanan, kemitraan dan posisi strategis negara sehingga dapat mengurangi potensi ancaman yang ada di sekitarnya.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka di atas, penulis dapat berargumen bahwa reaksi India terhadap Belt and Road Initiative didorong oleh aspek geoekonomi. Rute Koridor BRI merupakan pintu gerbang bagi Tiongkok untuk menjadi kekuatan ekonomi dominan di Asia Selatan. Singkatnya, itu bisa mempengaruhi perdagangan India di Asia, mempengaruhi kedaulatan India dan pengaruh India dengan status *emerging power* di dunia. India berupaya mengimbangi Tiongkok yang menginisiasi Belt and Road Initiative dengan melalui kebijakan geoekonomi. Tujuan India selain menguatkan pengaruh di kawasan Asia juga mengembangkan perekonomian dan sektor perdagangan dengan dibentuknya melalui dibentuknya kerja sama Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) yang dibangun bersama Jepang selaku kedua negara oposisi Belt and Road Initiative.

India juga mempromosikan kerjasama ekonomi, ikatan budaya dan mengembangkan hubungan strategis dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika melalui keterlibatan regional dan multilateral. dengan dibentuknya AAGC. Serta bergabungnya India ke dalam Blue Dot Network yang diinisiasi AS adalah cara India untuk menyaingi Tiongkok di bidang

investasi infrastruktur. Langkah India untuk bergabung dalam BDN dapat dikatakan tepat karena konsep dan citra BDN yang memiliki perbedaan berupa BDN merupakan inisiatif bersama.

Bukan hanya dikontrol oleh negara tunggal, selain itu BDN tidak memberikan pinjaman pada negara yang terlibat sehingga tidak membuka peluang akan kemungkinan negara terlibat menjadi terlilit hutang/debt trap. Keseluruhan motivasi dibalik upaya-upaya ini merupakan cerminan dari teori Balance of Power yang mana diterapkan India sebagai basis langkah kerjasamanya dengan negara lain. Motif politik yang melatabelakangi BRI diantaranya adalah Tiongkok, melalui BRI-nya, berusaha membangun tatanan regional baru di Asia Pasifik dan Asia Tengah untuk menggusur tatanan internasional liberal yang dipimpin Barat. Tatanan regional baru ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, dari organisasi regional baru yang tidak terpengaruh oleh pengaruh Barat, hingga peningkatan kehadiran militer Tiongkok di LCS. Menegaskan dirinya sebagai pemimpin tatanan regional baru ini membantu Tiongkok mengejar kepentingan nasionalnya.

Selain itu, karena Geoekonomi memiliki 4 variabel utama, yang mana 3 diantaranya adalah faktor ekonomi, geopolitik dan geografi. Maka ketiga variabel ini dikaitkan dengan motivasi-motivasi diberlakukan nya Balancing yang memang dilandasi oleh kepentingan politik dan ekonomi global. Kebijakan investasi yang merupakan bagian dalam proyek BRI menjadi tolak ukur dalam penggunaan konsep Geoekonomi dan konsep geoekonomi untuk menganalisis pengaruh geoekonomi dalam sikap penolakan dan berguna untuk menjelaskan upaya yang dijalankan India seperti dibentuknya kerjasama dengan negara lemah lain, melalui skema ekonomi Asia Africa Growth Corridor sebagai salah satu bentuk *Balancing* dan bergabungnya India dengan Jepang, AS dan Australia didalam inisiasi Blue Dot Network yang

juga merupakan proyek investasi infrastruktur sebagai salah satu bentuk *Balancing* untuk mengimbangkan posisinya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan ialah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Dimana tipe penelitian eksplanatif ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman pembaca terkait suatu subyek tertentu. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan mengapa fenomena tertentu berjalan seperti itu. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengidentifikasi sebab dan akibat dari fenomena apapun yang mereka teliti. Kemudian dalam penelitian akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis dengan menjelaskan kejadian yang terjadi dalam permasalahan yang menjadi topik penelitian dengan adanya batasan yaitu ruang lingkup yang telah penulis tentukan.

Adanya tipe penelitian eksplanatif adalah untuk memahami isu yang terjadi berdasarkan sintesa pemikiran dan argumen utama yang telah penulis buat⁴¹. Dengan menggunakan tipe penelitian penulis berusaha menganalisis apa saja bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah India sebagai bentuk tandingan terhadap proyek BRI serta bagaimana pemerintah India merespon proyek investasi infrastruktur oleh Tiongkok tersebut.

⁴¹ Jonker, Jan dan Bartjan Pennink. (2010). *The Essence of Research Methodology*, 46-159. Berlin: Springer

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan memilih periode tahun 2013 hingga 2020. Alasan dari pengambilan jangkauan waktu penelitian ini adalah karena tahun 2013 adalah tahun diresmikannya inisiasi BRI oleh presiden Xi. Batas akhir dari penelitian ini sampai pada tahun 2020 dimana India menyatakan bahwa negaranya tidak mendukung dan tidak akan berpartisipasi dalam Belt and Road Initiatives di forum pertemuan Shanghai Cooperation Organization (SCO) ke-20 dikarenakan SCO adalah sebuah forum yang terdapat India dan Tiongkok sebagai anggota di dalamnya yang turut memiliki andil dalam BRI. Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan progres BRI dari Tiongkok maupun India yang menjadi subjek dalam penelitian ini menjadi acuan dipilihnya tahun 2020 sebagai tahun penutup jangkauan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini, dan penulis mengklaim bahwa teknik tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hal ini didasarkan pada karya Margaret G. Hermann (2008) dan menjelaskan bahwa metode ini dapat digunakan dalam studi di mana sumber primer tidak tersedia. Hal ini juga didukung dengan menggunakan menggunakan internet. Suatu metode sebagai sarana untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Selain itu, penulis menganalisis sumber data seperti buku, majalah internasional, atau data resmi dari India, pemerintah Tiongkok, dan organisasi regional yang terdiri dari India dan Tiongkok untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan interpretasi pribadi penulis berdasarkan data yang diperoleh untuk membuktikan

argumen utama dan menjawab rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Sumber data yang digunakan penulis adalah data kualitatif yang berasal dari literatur-literatur, dikarenakan itu metode penulis dalam menganalisis data dan sumber adalah melalui definisi terkait rumusan masalah, lalu penjelasan hipotesis atas rumusan masalah, lalu memformulasikan sintesa serta argumen utama setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data kembali.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bahasan pada penelitian ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa, argumen utama, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai berkembangnya dominasi BRI di kawasan Asia terutama India, serta bagaimana keduanya menjadi dua aktor kuat di kawasan Asia dalam sektor ekonomi dan investasi infrastruktur. Dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh India untuk mengimbangi Belt and Road Initiative

Bab III menjelaskan Balancing dalam menganalisis upaya-upaya India dalam mengimbangi BRI Tiongkok

Bab IV menjelaskan Geoekonomi dalam menganalisis upaya-upaya India dalam mengimbangi BRI Tiongkok

Bab V berisi kesimpulan dan rangkuman atas keseluruhan analisis dari kerangka pemikiran, sintesa dan argumen utama dan menjadi penutup dalam penelitian ini.